BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan Perkeretaapian.

Perkeretaapian merupakan salah satu bentuk alat transportasi yang memiliki karateristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuan untuk mengangkut baik penumpang maupun barang secara masal, hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang.

Pada masa perjuangan Indonesia perusahaan kereta api dengan nama Djawatan kereta Api Republik Indonesia (D.K.R.I). Sejak semula telah menunjukan dan membuktikan tidak ketinggalan dalam darma baktinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ini.

Berikut masa perkembangan perusahaan perkeretaapian yang terbagi dalam masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.

3.1.1 Masa sebelum kemerdekaan.

Pada abad ke 19 kereta api telah dikenal di Indonesia, kemudian pada tanggal 17 juni 1868 kereta api pertama dijalankan antara Semarang/Kemijen dan Tanggerang dengan jarak 26 Km. Pencangkulan pertama untuk pemasangan lintasan dilakukan oleh Gubernur Sloet Van Beele di Semarang pada tanggal 17 juni 1864.

Atas dasar keberhasilan mengoperasikan pada lintasan tersebut, NISM makin memperluas jaringan operasinya dengan memasang dan membuka untuk lintasan umum selanjutnya, seperti:

1. Lintasan Semarang Gundih,selesai dibangun pada tanggal 18 februari 1870.
2. Lintasan Surakarta sampai Lempuyung, selesai dibangun pada tanggal 1 Januari 1873.
3. Lintasan Jakarta sampai Bogor, selesai dibangun pada tahun 1873.
4. Lintasan Semarang sampai Surabaya, selesai dibangun pada tahun 1903.
5. Lintasan Secang sampai Parakan,selesai dibangun tahun 1907.

Perusahaan-perusahaan kereta api pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah Staats-Spoorwegen(SS). Di samping Staats-Spoorwegen(SS) ada 11 perusahaan kereta api swasta (partikulir) di Pulau Jawa dan satu di Pulau Sumatera,yakni:

1. N.V. Nederlansch Indische Spoorweg My (NIS).
2. N.V. Semarang Cheirebon Stoomtram My (SJS).
3. N.V. Sarjoe Dal Stoomtram My (SDC).
4. N.V. Semarang joana Stoomtram My (SCS).
5. N.V. Oost Java Stroomtram My (OJS).
6. N.V. Kediri Stroomtram My (KSM).
7. N.V. Modjokerto Stoomtram My (MdSM).
8. N.V. Malang Stoomtram My (MSM).
9. N.V. Pasuruan Stoomtram My (PsPm).
10. N.V. Probolinggo stoomtram My (PbSm).
11. N.V. Madoera Stoomtram (Mad SM).
12. N.V. Deli Spoorweg My (DSM) di pulau Sumatera.

Pada masa pecah Perang Dunia II perusahaan-perusahaan kereta api mengalami masa-masa keemasan, sampai tiba waktunya wilayah Hindia Belanda

diduduki angkatan perang Jepang tepatnya pada tanggal 18 maret 1942. Kemudian oleh pemerintahan Jepang, pengusahaan jaringan rel disatukan di bawah kekuasaan tentara pendudukan, dengan kantor pusatnya di gedung kantor pusat Staats-Spoorwegen (SS) di Bandung.

Sehubungan dengan penyatuan kereta api, pembagian wilayah pengusahaan diatur kembali. Di Pulau jawa, yang sebelumnya ada dua wilayah eksploitasi milik SS, yaitu eksploitasi lintas-lintas barat, dibentuk menjadi tiga wilayah eksploitasi pengusahaan, yaitu eksploitasi tengah kantor pusatnya di Semarang dan Eksploitasi timur kantor pusatnya di Surabaya.

Wilayah eksploitasi meliputi tiga daerah inspeksi, yaitu:

1. Inspeksi 1 berpusa di Jakarta.
2. Inspeksi 2 berpusat di Cirebon.
3. Inspeksi 3 berpusat di Bandung.

Wilayah eksploitasi tengah meliputi 4 daerah inspeksi, yaitu:

1. Inspeksi 4 berpusat di Purwokerto.
2. Inspeksi 5 berpusat di Semarang.
3. Inspeksi 6 berpusat di Jogjakarta.
4. Inspeksi 7 berpusat di Surakarta.

Wilayah eksploitasi timur meliputi 4 daerah inspeksi, yaitu:

1. Inspeksi 8 berpusat di Madiun.
2. Inspeksi 9 berpusat di Surabaya.
3. Inspeksi 10 berpusat di Malang.
4. Inspeksi 11 berpusat di Jember.

Di Sumatra terdapat 3 wilayah eksploitasi, yaitu Sumatera Selatan berpusat di Palembang, Sumatera Barat berpusat di Padang, dan Sumatera Utara berpusat di Medan.

Semasa Jepang berkuasa di Indonesia, semua kereta api milik pemerintah Hindia Belanda maupun milik swasta diambil alih oleh pihak Jepang. Selanjutnya Jepang membagi pengusahaanya kepada angkatan perang Jepang, yaitu:

a. **Angkatan darat (Rikugun),** yang menguasai seluruh perkeretaapian di pulau Jawa dengan Rikyu kyoku, yang kemudian berubah menjadi Tetsudo Kyoku dan membagi daerah operasinya sebagai berikut:

1. To-Bu (Jawa Timur).
2. Chu-Bu (Jawa Tengah).
3. Shei-Bu (Jawa Barat).

b. **Angkatan laut (kaigun),** yang menguasai perkeretaapian di Pulau Sumatera

dengan nama Tetsudo-Tai yang berkantor pusa di Bukit Tinggi.

3.1.2 Masa Sesudah Kemerdekaan

Masa pemerintahah pendudukan Jepang berakhir pada saat datangnya Sekutu ke bumi Indonesia dan akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, karena tentara Inggris tidak dapat melakukan segera tugasnya, sehingga terjadi kekosongan dalam pemerintahan dan kekosongan kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh bangsa indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang telah menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia.

Pengambil alihan perkeretaapian di kantor pusat Bandung pada tanggal 28 September 1945. Peristiwa itu dilakukan oleh pegawai-pegawai senior bangsa Indonesia dan di dukung ratusan pegawai lainnya di Balai Besar Bandung. Sejak itu perkeretaapian Indonesia dikuasai oleh "Djawatan Kereta Api Republik Indonesia"

Disingkat D.K.A.R.I sebagai milik negara Indonesia,sehingga tanggal 28 September dijadikan sebagai Hari Kereta Api.

3.2 Perubahan Status Nama Perusahaan Perkeretaapian.

Pemerintah Indonesia mengambil alih penguasaan atas sistem jaringan dan perusahaan sistem perkeretaapian dari penjajah mulai tahun 1945 dan menasionalkan menjadi **Djawatan Kereta Api (DKA)**, yang tahun 1963 berubah nama statusnya menjadi Perusahaan **Negara Kereta Api (PNKA)** lalu berubah menjadi Perusahaan **Jawatan Jereta Api (PJKA)** pada tahun 1971, kemudian sejak tanggal 2 Januari 1991 menjadi **Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).**

Kemudian baru-baru ini dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pekerjaan, maka Perum KA dengan Peraturan Pemerintah no 57 tahun 1990 perlu dialihkan bentuknya menjadi **Persero** sebagaimana dimaksud pada UU no 9 tahun 1969.Sehubungan dengan hal tersebut perlu di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah atas dasar:

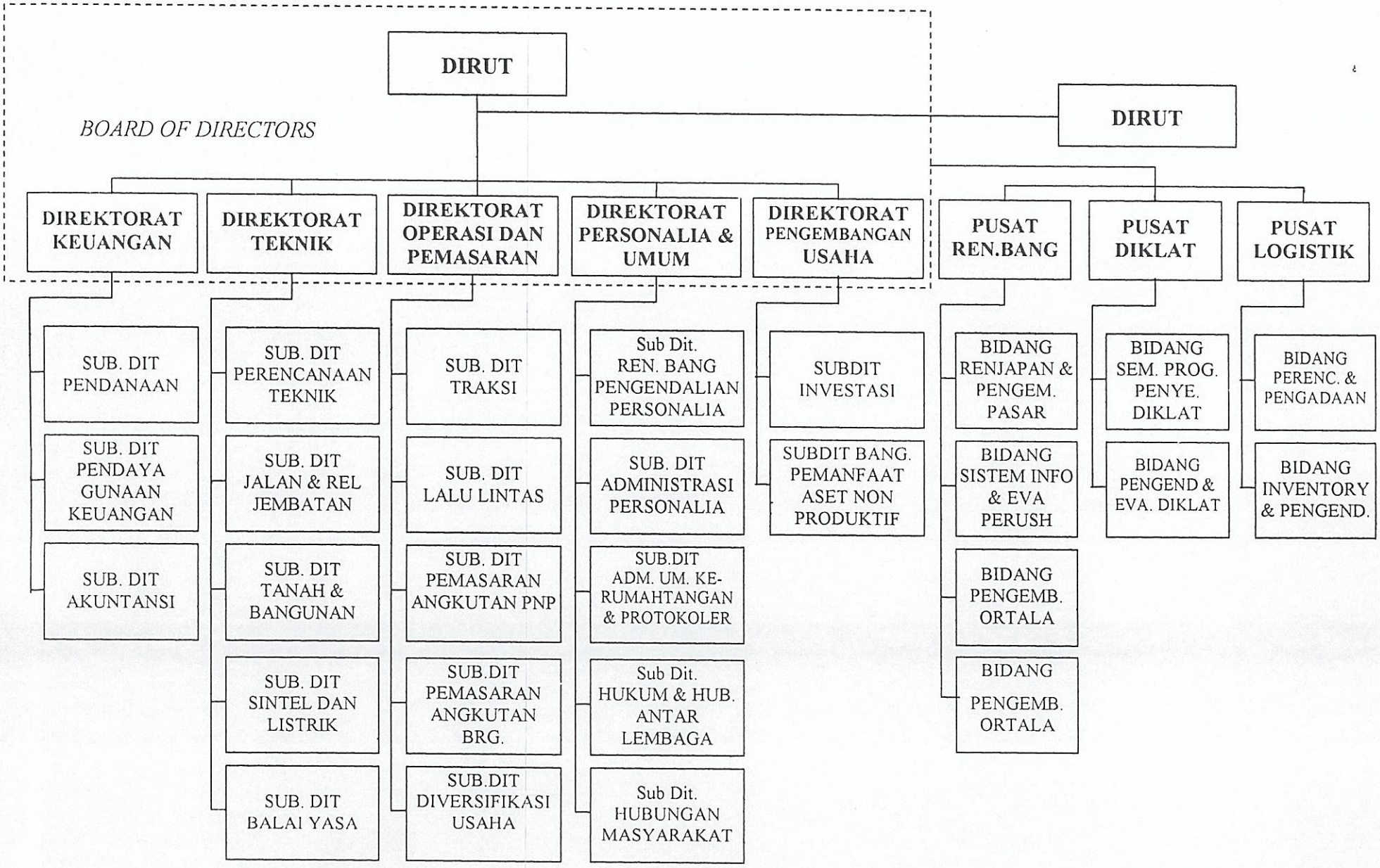
1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
2. Undang-undang no 9 tahun 19669 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang no 1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara

(lembaran negara tahun 1969 no 16, tambahan lembaran negara no 2890) menjadi Undang-Undang (lembaran negara tahun 1969 no 40, tambahan lembaran negara no 2904).

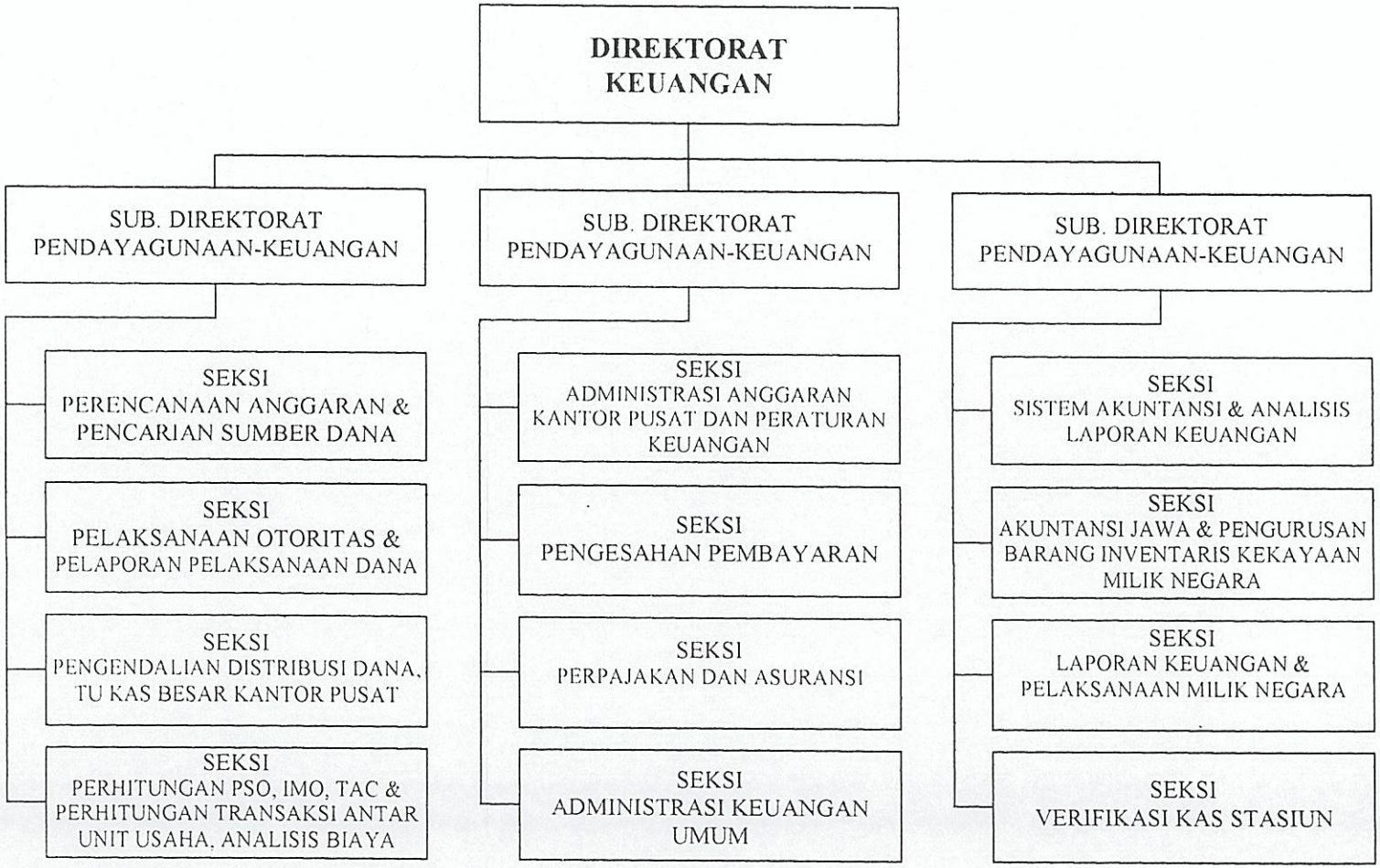
3. Undang-Undang no 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian (lembaran negara tahun 1992 no 47, tambahan lembaran negara no 3479).
4. Undang-Undang no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (lembaran negara tahun 1995 no 13, tambahan lembaran negara no 3587).
5. Peraturan Pemerintah no 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (lembaran negara tahun 1998 no 15, tambahan lembaran negara no 3731).

Maka pada tanggal 1 Juni 1999 resmi berubah statusnya dari PERUM K.A menjadi PT.K.A sampai sekarang.

3.3 STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (Persero)
TINGKAT KANTOR PUSAT



3.3.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT KEUANGAN



3.3.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SUB DIREKTORAT
PENDAYAGUNAAN KEUANGAN



3.4 Job Description

Berikut ini pembagian tugas secara umum dari struktur organisasi di atas :

1. Direktorat Keuangan

Tugasnya adalah melaksanakan tugas sebagian Direktur Utama dalam merumuskan kebijaksanaan serta mengelola keuangan perusahaan yang meliputi penyusunan rencana kerja perusahaan tahunan, penyediaan dana baik untuk modal kerja dan investasi, perhitungan PSO, IMO, dan TAC, pelaksanaan administrasi keuangan/pembendaharaan, pelaksanaan akuntansi menejemen, akuntansi keuangan, serta membantu pengurusan barang inventariskekayaan milik negara.

2. Direktorat Teknik

Tugasnya adalah melaksanakan tugas sebagian Direktur Utama dalam perumusan kebijaksanaan teknis dan perumusan pembinaan pemeliharaan prasarana pokok berupa jalan rel, jembatan, perangkat sinyal, telekominikasi dan instalasi listrik umum, dan listrik aliran atas serta pemeliharaan dan perbaikan sarana balai yasa, perencanaan maupun kelayakan sarana dan prasarana serta pendayagunaan tanah dan bangunan.

3. Direktorat Operasi dan Pemasaran

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam perumusan kebijaksanaan teknis dan perumusan pembinaan teknis operasional serta menyusun program operasi lalulintas perjalanan kereta api, program pemasaran angkutan penunjang dan barang, program pemeliharaan dan pengoperasian sarana traksi di lintas serta pengendaliannya, dan program pengusahaan jasa angkutan lain yang terkait dengan tugas pokok.

4. **Direktorat Personalia dan Umum**

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam penyusunan rencana pengembangan produktivitas dan pengendalian personil, serta penyusunan program pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pelaksanaan program mutasi dan administrasi personalia, penjelasan administrasi umum, kerumahtanggaan dan protokoler, penjelasan program serta kegiatan hukum dan hubungan antar lembaga serta penyusunan program dan pelaksanaan humas.

5. **Direktorat Pengembangan Usaha**

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam pengelolaan investasi perusahaan yang bersifat pengembangan usaha baik dari dana internal maupun eksternal, serta merencanakan pengembangan penempatan aset non produktif dengan berdasarkan prinsip kelayakan finansial, merencanakan investasi untuk rehabilitasi aset dukungan fasilitas operasional dan pemeliharaan dengan berdasarkan prinsip kelayakan finansial .

6. **Pusat Ren-Bang**

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam penyusunan rencana jangka panjang dan pengembangan pasar, informasi dan evaluasi perusahaan, pengembangan organisasi dan tatalaksana penelitian dan pengembangan, kelaikan dan analisis mengenai dampak lingkungan.

7. **Pusat Diklat**

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam membina, mengendalikan, mengevaluasi dan menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan di lingkungan perusahaan serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

8. Pusat Logistik

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Utama dalam menganalisis dan merencanakan pengadaan barang/pengendalian persediaan barang-barang penyusunan program penyimpanan dan distributsi, pengujian barang–barang penyiapan informasi logistik, penghapusan barang perusahaan dan pembinaan personil logistik serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap unit-unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas logistik pergudangan, inklaring dan percetakan.

3.5 Penjelasan Secara Khusus Mengenai Direktorat Keuangan

Pada bagian Direktorat Keuangan mempunyai tiga sub direktorat yaitu:

1. Sub Direktorat Pendanaan

Mempuanyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat keuangan dalam penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) tahunan, merencanakan kebutuhan dana, mencari sumber pendanaan, pengendalian dan pendistribusian dari perusahaan baik untuk tenaga kerja maupun invesasi, perhitungan PSO/IMO/TAC dan perhitungan transaksi usaha antara unit usaha serta penata usahaan kas besar kantor pusat.

2. Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan

Melaksanakan sebagian tugas direktorat keuangan dalam penyusunan dan pengendalian peraturan keuangan perusahaan, administrasi anggaran kantor pusat, pelayana pengesahan pembayaran baik internal maupun eksternal transaksi

keuangan di kantor pusat, serta penyelesaian perpajakan dan penyaluran dana, pembinaan usaha kecil dan koperasi, tuntutan ganti rugi, administrasi dan kesekretariatan direktur keuangan dan administrasi keuangan umum lainnya.

3. **Sub Direktorat Akuntansi**

Mempunyai tugas sebagian direktorat keuangan dalam penyusunan sistem akuntansi, laporan keuangan PT. KA berdasarkan konsolodasi laporan keuangan daerah operasi di Jawa dan eksploitasi di Sumatera serta laporan keuangan kantor pusat, membuat laporan manajemen menganalisis laporan keuangan membina unit-unit akuntansi yang berada di lingkungan PT. KA, melaksanakan vertivikasi buku kas stasion membina pemeriksa kas stasion serta pengurusan barang-barang inventaris kekayaan milik negara.

3.6 Penjelasan Khusus Mengenai Sub Direktorat Pendayagunaan Keuangan

Sub direktorat pendayagunaan keuangan mempunyai empat seksi yaitau:

1. **Seksi Administrasi Anggaran Kantor Pusat dan Peraturan Keuangan**

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi anggaran kantor pusat, menusun dan mengendalikan peraturan keuangan perusahaan.

2. **Seksi Pengesahan Pembayaran**

Mempunyai tugas melaksanakan pengesahan pembayaran baik internal maupun eksternal, serta transaksi keuangan di kantor pusat.

3. **Seksi Perpajakan dan Akuntansi**

Mempunyai tugas menghitung kewajiban perpajakan, melaksanakan administrasi dan pelaporan perpajakan serta pengurusan administrasi pengasuransian aset dan angkutan.

4. **Seksi Administrasi Keuangan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan tuntutan ganti rugi (TGR), kesekretariatan kantor direktur keuangan dan penyaluran/pemantauan pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK), serta administrasi keuangan umum lainnya.

3.7 Penjelasan Sistem Penggajian PT.KA

Karena tempat kami melaksanakan survey di bagian keuangan sub direktorat pendayagunaan keuangan maka kami akan menjelaskan sedikit tentang sistem penggajian di PT.KA.

Sistem penggajian adalah penerimaan bagi setiap pegawai sebagai imbalan atau balas jasa atas hasil kerja yang di berikan oleh pemberi kerja perusahaan, sedangkan Gaji pokok adalah komponen balas jasa yang diberikan setiap bulan kepada semua pegawai. Selain gaji pokok yang diterima pegawai juga memperoleh tunjangan-tunjangan yang di berikan perusahaan.

3.7.1 Macam-macam Tunjangan

1. **Tunjangan Isteri/Suami:**

Diberikan kepada pegawai yang telah beristeri dan bersuami sebesar 10 % dari gaji pokok, dimana apabila suami /isteri sama-sama bekerja di PT. KA maka tunjangan di berikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

2. **Tunjangan Anak:**

Diberikan setiap bulannya kepada seluruh pegawai yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya.

Tunjangan diberikan sebesar 2 % darai gaji pokok, maksimal dibayarkan 2 orang anak.

3. **Tunjangan Perusahaan:**

Diberikan kepada seluruh pegawai setiap bulan sebesar 25 % dari gaji pokok.

4. **Tunjangan Perbaikan Penghasilan:**

Diberikan kepada seluruh pegawai tiap bulan sebesar 15 % dari gaji pokok + tunjangan isteri + tunjangan anak dan + Rp 155.250 + 64.750.

5. **Tunjangan Struktural:**

Diberikan setiap bulannya kepada tiap pegawai yang menduduki jabatan struktural.

6. **Tunjangan Beras:**

Diberikan kepada pegawai tiap bulannya dengan besaran 10 kg per orang jika diuangkan sebesar Rp.2500 per kg jadi tiap orang memperoleh 25.000 perbulannya.

7. **Tunjangan Fungsional:**

Diberikan kepada pegawai yang mempunyai ijasah khusus, misal kepada tenaga kesehatan, tenaga analisis sistem, tenaga akuntansi, pemogaman komputer, dan operator komputer.

8. **Tunjangan Pajak Penghasilan:**

Diberikan setiap bulan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan penghasilan tidak kena pajak

9. **Iuran Perusahaan untuk Pensiun Pegawai:**

Diberikan kepada seluruh pegawai setiap bulannya sebesar 12,50 % dari gaji pokok + tunjangan isteri/suami + Tunjangan anak .

Kemudian selain tunjangan yang diberikan, setiap pegawai juga di berikan potongan-potongan bersifat wajib dan potongan dinas

3.7.2 Macam-macam Potongan

1. **Potongan Tabungan Hari Tua:**

   Potongan hari tua dikenakan kepada seluruh pegawai sebesar 3,25 % dari gaji pokok + tunjangn isteri/suami + tunjangan anak.

2. **Potongan Iuran Perusahaan Untuk Pensiun Pegawai:**

   Dikenakan setiap bulannya sebesar 12,50 % dari gaji pokok + tunjangan Isteri/suami + tunjangan anak.

3. **Dana Pensiun Pegawai:**

   Potongan dikenakan sebesar 4,75 % dari gaji pokok + tunjangan isteri/suami + tunjangan anak.

4. **Dana Kesehatan:**

   Dikenakan sebesar 2 % dari gaji pokok.

5. **Piutang Pegawai:**

   Potongan dikenakan pada yang mempunyai utang kepada perusahaan.

6. **Potongan Pajak:**

   Besarnya potongan ditentukan sesuai dengan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan.

7. **Potongan Sewa Rumah Dinas/Tanah:**

   Diberikan potongan bagi pegawai yang menempati fasilitas rumah dinas dan bagi mereka yang yang menmpati tanah milik perusahaan dikenakan sewa.

8. **Potongan BKRKA:**

Terdiri dari:

a). Potongan simpanan: bagi yang menabung di BKRKA.

b). Potongan Pinjaman: bagi yang mempunyai pinjaman pada BKRKA.

c). Kematian: pemotongan iuran kematian dikenakan Rp. 1000 dan hal ini khusus dikenakan kepada para pegawai yang secara sukarela ikut program dengan mengisi daftar pernyataan sebagai peserta kematian BKRKA.

9. **Potongan lain-lain.**

3.8 Alat yang Digunakan

Dalam membuat atau merancang program dari hasil data yang di dapat kami menggunakan alat bantu yaitu hardware dan software.

3.8.1 Hardware (perangkat keras)

Adalah seluruh peralatan yang terlihat, berbentuk tiga dimensi yang dapat diraba, dan membentuk suatu sistem komputer yang memungkinkan komputer dapat melaksanakan tugasnya.

Contoh: - keyboard - mouse

- image scanner - printer
- microphone - disk drive
- disket - dan lain-lain

3.8.2 Software (perangkat lunak)

Adalah kumpulan instruksi yang memberikan sifat hidup pada komputer dan melalui software inilah kita dapat menyusun komputer untuk melakukan segala hal.

Contoh: - Operating System (dos, windows, Unix, b.o.s, dan lain-lain)

- Bahasa Pemograman (Cobol, Fortran, ALGOL, dan lain-lain)

- Package Program (WordStar, dbase, ms-word, ms-excel, dan lain-lain)